BAB IV

HASIL DAN BAHASAN LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

4.1.1 Efektivitas Evaluasi Perencanaan Pemabangunan oleh Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2009

Monitorong dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi mengikuti jadwal dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan di dua tingkatan yaitu ;

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota
b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota; dilaksanakan sepanjang bulan Maret.

Adapun materi monitoring dan evaluasi mengikuti ketentuan dan tata cara penyelenggaraan musyawarah perncanaan pembangunan, yang secara garis besar meliputi hal-hal berikut ;

1) Tujuan
2) Masukan
3) Mekanisme
4) Keluaran
5) Peserta

6) Narasumber

7) Dsb.

Diperlukan alat atau instrument untuk melakukan monitorong dan evaluasi perencanaan pembangunan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dalam tiga tahun periode pelaksnaan pemerintahan kepala daerah terpili telah banyak kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalm perkembangan pembangunan sebagai hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir (2006-2009). Secara garis besar, ukuran ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembanguna daerah yang meliputi ;

1. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School

of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya, indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.

2. Penduduk miskin

   Penduduk yang mampu tapi kebutuhan sehari-harinya kurang tercukupi

3. LPP (% per tahun)
4. Pendapatan per kapita (harga belaku)
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan indicator ekonomi yang diukur berdasarkan nilai tambah bruto dari Sembilan sector lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan (perhitungan tanpa inflasi)

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

   Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan harga belaku pada tahun

7. Inflasi

   Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi

barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga

termasuk kurangnya distribusi).[rujukan?] Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank

sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu

1. kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

2. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif-tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang

pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.

Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai

uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, kondisi atau prestasi yang dicapai pada tahun 2006-2009 dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran 2010 dapat dilihat tabel berikut ;

Tabel 4.1
Kondisi Makro Pembangunan Daerah Tahun 2009

No	Indikator Makro	Satuan	2005	2006	2007*)	2008*)
1	**IPM**		67,56	69,20	70,79	71,89
a	RLS	Tahun	6,45	6,71	8,55	9,25
b	AMH	%	96,23	97,05	97,13	97,43
c	AHH	Tahun	65,70	65,89	66,19	66,56
d	Kemamp. Daya Beli	Ribu Rp	554,47	558,94	559,5	563,5
2	**Jumlah Miskin**					
a	Penduduk Miskin	Jiwa	746.857	813.742	619.919	606.072
b	Keluarga Miskin	Kk	218.211	226,401	181.697	177.638
3	**Pendapatan Per Kapita (Harga Berlaku)**	Rp	4.186.955	5.244.460	5.403.902	5.316.435
4	**PDRB**					
a	PDRB a.d H.Konstan	Juta Rp.	7.105.103	7.318.966	7.611.725	5.316.435
b	PDRB a.d H.Berlaku	Juta Rp.	11.104.912	12.154.587	12.640.771	12.635.144,54
5	**LPE**					
a	LPE Konstan 1993	%/ Thn	4,12	3,01	4,00	> 6,00
b	LPE Harga Berlaku	%/ Thn	19,26	12,90	17,14	> 12,00
6	**Inflasi**	%/ Thn	5,18	8,16	8,00	8
7	**Investasi**	Milyar Rp	4.487	4.424	4.645	> 4.645
8	**Laju Investasi**	%	1,23	9,45	5.00	> 5.00
9	**Konsumsi Pemerintah**	Milyar Rp	612,6	932,8	1.071,1	
10	**Jumlah Penduduk**	Jiwa	2.224.993	2.278.836	2.339.193	2.376.620
11	**LPP (% Per Tahun)**	%/ Thn	1,67	1,81	1,66	1,66
12	**TPT**	%/ Thn	7,11	8,16	8,00	< 8.00
13	**TPAK**	%/ Thn	44,51	56,73	57,86	> 57.86
14	**Indeks Pendidikan**					
a	APK SD/Paket A	%/ Thn	107,40	108,45	109,45	110,45
b	APK SMP/MTs/Paket B	%/ Thn	75,41	88,32	99,32	99.33
c	APK SMA/SMK/MA/P- C	%/ Thn	24,62	27,46	30,12	32.05
d	APM SD/MI/Paket A	%/ Thn	98,55	97,20	99,20	100.00
e	APM SMP/MTs/Paket B	%/ Thn	65,60	80,33	89.00	90,33
f	APM SMA/SMK/MA/ Paket C	%/ Thn	20,79	26,79	29,95	30.88
15	**Indeks Kesehatan**					
a	AKB	Per 1000	53,25	44,39	42,00	< 42.00
b	AKI	Per 100.000	364,17	363,19	< 363,19	< 363,19
c	Cakupan Air Bersih	%	58,12	61,50	63,31	> 63,31
d	SPAL	%	39,91	39,63	40,07	> 40,07
e	JAGA	%	47,79	52,00	54,81	> 54,81

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi Tahun 2009

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2006, IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. IPM

yang ditetapkan yaitu 67,81. Peningkatan indeks tersebut berkaitan erat dengan terjadinya peningkatan pada beberapa indicator komponen pendukung IPM, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 6’71 tahun; Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 65,89 tahun; Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 97,94 % dan kemampuan daya beli mencapai Rp. 565.963,33.

Peningkatan IPM terutama dilakukan melalui upaya pengembangan dan penigkatan kualitas sinergitas antar pelaku pembangunan dalam rangka pelaksanaan program-program yang berfokus pada upaya akselerasi peningkatan IPM secara lebih optimal. Pada tahun 2009, IPM Kabupaten Sukabumi diperkirakan dapat mencapai angka yang ditargetrkan yaitu 70,26 pada akhir tahun. Hal ini berkaitan dengan cukup efektifnya pelaksanaan program atau kegiatan yang berkaitan dengan derajat pendidikan dan derajat keseahtan. Sementara berkaitan dengan peningkatan daya beli (PPP = *Purcashing Power Party*) penduduk Kabupaten Sukabumi perkiraan PPP untuk tahun 2009 dapai mencapai sebesar Rp 565.963,33, sepanjang tahun 2009 dalam iklim investasi di Kabupten Sukabumi terbilang cukup kondusif dan kondisi cuaca yang sangta menguntungkan bagi sector pertanian perkiraan PPP di atas angka target di dalam RPJMD. Walaupun dukungan anggaran masih cukup minim sehingga lambat peninggkatannya, diharapkan pada tahun 2010 dengan orientasi

program atau kegiatan yang berfokus pada penguatan infrastruktur ekonomi dapat memberikan kontribusi dan landasan bagi terciptanya kondisi perekonomian daerah dan kemampuan daya beli yang lebih baik.

Peningkatan IPM 2009-2008 diharapkan lebih akseleratif karena Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009-2010 didukung anggaran khusus dari pemerintahan Propinsi Jawa Barat dalam rangka Pelaksanaa Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM).

Pelaksanaan program atau kegiatan PPK-IPM pada tahun 2009 dengan target akselerasi IPM sebesar 70,26, walau masih dirasakan berat karena terbatas hanya mencakup 7 wilayah kecamatan yang meliputi 23 desa/kelurahan, namun model implementasi program atau kegiatan dalam PPK-IPM yang bersifat *multi-stakeholders* diharapkan menjadi media pembeljaran yang baik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja program atau kegiatan pembangunan daerah di masa mendatang.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Sukabumi tahun 2007 sebesar Rp 7.714.821 dan meningkat pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 7.974.850. pada tahun 2009, PDRB per kapita meningkat kembali menjadi peningkatan PDRB menjadi sebesar Rp 8.302.792, kenaikan secara rata-rata mencapai 25%. Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum

menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat kabuptaen sukabumi secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan indicator ekonomi yang diukur berdasarkan nilai tambah bruto dari Sembilan sector lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan (perhitungan tanpa inflasi) tahun 2005 sebesar Rp 7.125.599.900,00 dan tahun 2008 perkembangannya mencapai Rp 8.015.200.000,00. Rata-rata peningkatannya per tahun sebesar Rp 296.533.366.666,00. Pada tahun 2005 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp 11.324.257.340.000,00. Kemudian pada tahun 2008 menjadi Rp 16.133.200.000,00. Sehingga rata-rata peningkatan PDRB atas harag berlaku sebesar Rp 4.808.942.660.000 untuk tahun 2009 mencapai taget yang ditetapkan sebesar Rp 17.239.598.000.000,00 dan tahun 2010 di atas Rp 18.922.601.000.000,00. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan pada beberpa sector atau lapngan usaha diantaranya bangunan dan kontruksi, industri pengolahan, pertanian dan jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan harga belaku pada tahun 2006 sebesar 12,9% dan pada tahun 2005 sebesar 19,26%. Sedangkan LPE berdasarkan harga konstan pada tahun 2006 mencapai sebesar 4,09%. Selama perode tahun 2005-2008

perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian perkembangannya berfluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan LPE atas dasar harga Konstan mulai tahun 2005 sampai tahun 2008 mencapai 4,09%. Sementara rata-rata LPE atas harga berlaku mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mencapai 14,25%. Perkiraan LPE tahun 2009 dan 20120 diharapkan di atas rata-rata.

Investasi atas dasar harga berlaku, perkembangan investasi di Kabuptaen Sukabumi menuju kea rah peningkatan. Pada tahun 2008 nilai investasi yang tercatat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebesar Rp 3.006.180.348.012,00. Dalam tahun 2009 meningkat menjadi Rp 4.463.813.058.543,00. Berdasarkan status perusahaan tahu 2008 tercatat jumlah PMA sebanyak 14 perusahaan. PMDN sebanyak 86 Perusahaan, swata murni sebanyak 860 perusahaan dan tahun 2009 PMA sebanyak 11 perusahaan, PMDN sebanyak 68 perusahaan, swasta murni sebanyak 799 perusahaan

Konsumsi atau anggaran belanja pemerintah dalam tahun 2006 sebesar Rp 932,8 milyar, terjadi kenaikan dari tahun 2005 sebesar Rp 612,6 milyar sedangkan pada tahun 2007 mencapai 1.701 milyar dan pada tahun 2009 diperkirakan meningkat lagi.konsumsi investasi pemerintah ini masih relative kecil

dibanding dengan investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

4.1.2 Ketepatan Evaluasi Perencanaan Pemabangunan oleh Badan Penelitian dan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2009

Recanan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2009 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen teknis operasional tahunan, memeuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, perioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, maka tiga pilar perlu pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mempedomani RPJMD Kabupaten Sukabumi. Indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaku pembangunan sehingga sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan baik.